

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haidar. 2010. Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik (Volume 1 No.1). Makasar: Universitas Negeri Makasar. Diakses pada 23 Mei 2020, dari <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- Azhari, Achmad. 2017. Kajian Implementasi Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS di Kantor Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau. TAPM. Lubuklinggau: Universitas Terbuka. Diakses pada 23 Mei 2020, dari <http://repository.ut.ac.id/7513/1/43056.pdf>
- Madjid, Meriana. 2017. Pengaruh Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Bappeda Kabupaten Morowali. Artikel. Palu: Universitas Tadulako. Diakses pada 30 Desember 2020, dari <https://media.neliti.com/media/publications/151474-ID-pengaruh-tambahan-penghasilan-pegawai-tp.pdf>
- Ma'ruf, Rismawati, Burhanuddin, dan Rully Mambo. 2016. Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai di Kantor Kecamatan Bunaken Manado. Artikel (Volume 3 No. 400). Manado: Universitas Sam Ratulangi. Diakses pada 23 Mei 2020, dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/13683>
- Witaradya, Kertya. 2010. Governance Consultant_Implementasi Kebijakan Model C G Edward III. Artikel. Diakses 1 Maret 2021, dari <https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-model-c-g-edward-iii/>
- Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 43 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Pemerintah Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Pemerintah Indonesia. 2018. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- Pemerintah Indonesia. 2019. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Pemerintah Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai
- Pemerintah Daerah. 2019. Peraturan Bupati Blitar Nomor 82 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta
- Iranovita, Liesnawaty. 2020. *Peningkatan Kinerja ASN Melalui Penerapan Sistem Daftar Kehadiran (Sidara) Elektronik*. Tesis. Malang: Universitas Merdeka Malang
- Nugroho, Rianto. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang (Model-Model Perumusan Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: Center For Academic Publishing Service.
- Uny.ac.id. (2007). Konsep Kebijakan Publik. Diakses pada 23 Mei 2020, dari <https://eprints.uny.ac.id/8530/3/BAB%202%20-%2007401241045.pdf>
- <http://repository.uin-suska.ac.id/4109/3/BAB%20II.pdf>
- Uny.ac.id (2008). Deskripsi Teori. Diakses pada 15 Juni 2021, dari <https://eprints.uny.ac.id/8552/3/BAB%202%20-%20084171>
- bpk.go.id. (2020). Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Penghasilan. Diakses 27 agustus 2021, dari https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Tunjangan-Kinerja-dan-Tunjangan-Tambahan-Penghasilan-PNS_puteri.pdf